



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 03/HK.03.1/5305/2022  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi yaitu menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022  
b. bahwa Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan . . . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

8. Keputusan . . . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 02/HK.03.1/5305/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2022

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1 Membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Alor Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Alor	Keputusan KPU Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi		√												
			2 Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan Kick Off/Deklarasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Alor		√												
				Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022		√												
	2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasinal pelaksanaan tugas kegiatan/tugas keseharian									√					√	
		2 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Penandatanganan Pakta Integritas Penyelenggara Pemilu (Anggota KPU dan ASN)		√													
			Pelaporan LHKPN dan LHKASN yang tepat waktu		√	√												
		2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	Pemberian penghargaan terhadap pegawai berprestasi										√					
		3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	Sosialisai Reformasi Birokrasi melalui media elektronik di lingkup KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkungan KPU Kabupaten Alor melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE)	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi RB di lingkungan KPU Kabupaten Alor														√
			2 Melakukan Pelaporan hasil Evaluasi Rencana Aksi RB di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi RB di lingkungan KPU Kabupaten Alor														√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)													
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	1 Evaluasi secara berkala produk hukum yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	1 Pemetaan Naskah dinas dilingkungan KPU Kabupaten Alor	Adanya produk hukum yang diterbitkan di lingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2 Pemetaan produk hukum yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih dan tidak harmonis dengan produk hukum yang lain	Jumlah produk hukum yang berhasil di revisi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3 Melakukan penyusunan produk hukum yang dipandang perlu	Jumlah naskah dinas yang sudah ditetapkan dalam tahun berjalan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Pengelolaan JDIH	1 Membentuk Tim JDIH KPU Kabupaten Alor	Terbentuknya Tim JDIH KPU Kabupaten Alor		√												
			2 Melakukan pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Alor	Terupdatenya data dan informasi dalam JDIH KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Organisasi/Kel embagaan	1 Evaluasi Organisasi	1 Pengisian Kuesioner Evaluasi/Survei persepsi terhadap pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Alor	Pelaporan hasil survei persepsi terhadap pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Alor												√		
		2 Penyesuaian SOTK	1 Penyesuaian SOTK sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2021	Tersusunnya Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Alor sesuai SOTK				√										
4	Penataan Tata Laksana	1 Peningkatan Ketatalaksana proses kerja serta SOP dilingkungan KPU Kabupaten Alor	1 Penyusunan peta jabatan dan SOP dilingkungan KPU Kabupaten Alor	Tersedianya peta jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing ASN			√											
				Setiap ASN telah memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kinerja			√											
			2 Evaluasi terhadap kinerja ASN dilingkungan KPU Kabupaten Alor	Evaluasi terhadap uraian tugas untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi melalui penyusunan SKP tiap semester							√							√
		3 Penyusunan dan Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Alor		Seluruh proses kegiatan dijabarkan melalui SOP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				SOP ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Alor serta telah diterapkan dalam proses pelayanan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1 Penetapan SOP PID di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Adanya kebijakan standar pelayanan dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder		√												
				2 Peningkatan Kapasitas pengelolaan PPID di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Meningkatnya kepuasan terhadap layanan PPID													
	Jumlah permintaan/permohonan informasi yang masuk, sedang diproses dan selesai di tindak lanjuti			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				Presentase kepuasan permohonan informasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			3 Penyusunan dan Panyampaian Laporan PPID	Tersedianya Laporan PPID							√					√			
		3 Tata kelola dan Implementasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) dilingkungan KPU Kabupaten Alor	1 Tata Kelola pemanfaatan Teknologi Informasi dilingkungan KPU Kabupaten Alor	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dilingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				Jumlah Aplikasi yang dimanfaatkan dilingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2 Pemanfaatan Aplikasi SPBE dalam pengelolaan administrasi kesekretariatan	Terisinya data aplikasi yang dimanfaatkan (Aplikasi Manajemen kepegawaian, penyusunan anggaran, keuangan, pengadaan barang/jasa)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik	Dapat diaksesnya SOP oleh publik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				Aplikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan KPU Kabupaten Alor yang selalu diperbaharui		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				Data jumlah pengunjung pada aplikasi yang bisa di akses publik		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
				Jumlah Pemohon melalui PPID KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			4 Penerapan Sistem Kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis, dinamis baik itu manual maupun digital dilingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Terdokumentasinya arsip vital				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5	Penataan Manajemen SDM ASN	1 Pembangunan Sistem Merit	1 Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	Seluruh Pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai		√													
				Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading		√													
				Adanya Pengukuran dan evaluasi SKP secara periodik Sasaran kinerja Individu						√						√			
			2 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya															√
				Jumlah Pelanggaran tahun ini		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			3	Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		2	Profesionalisme ASN	1	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja		√	√	√	√	√	√	√	√	√			
6	Penguatan Pengawasan	1	Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1	Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja		√											
				2	Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi	Adanya alat sosialisasi di lingkungan unit/satuan kerja.						√							
						Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja; dan								√					
						Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja								√					
		3	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi														√	
				Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan									√						√
		2	Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	1	Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja		√											
				2	Pelaksanaan SPIP: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern	Terselenggaranya: 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi 5) Pemantauan pengendalian intern									√				√
				3	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Kartu Kendali tepat waktu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3	Peningkatan Integritas Individu	1	Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		√	√										
2	Penyampaian LHKASN			100% LHKASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja		√	√												
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja	Tersedianya Renstra Satuan Kerja		√											
				2	Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV		√											

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)															
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			3	Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Adanya Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi		√													
				Persentase sasaran Kinerja yang tercapai														√		
				Jumlah Revisi Anggaran yang berhasil dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja organisasi															√	
			4	Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja														√	
			5	Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja															√
					Evaluasi Lakip unit/satuan kerja															
		6	Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan tepat waktu		√														
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	Terisinya aplikasi eLapkin/Data e-Lapkin unit satuan kerja termutakhir			√			√			√			√		
				2	Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	% jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan dan Pengelola PPBJ bersertifikat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		8	Pelayanan Publik	1	Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja	<p>1. Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>1. Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja</p> <p>2) Persyaratan Layanan;</p> <p>3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;</p> <p>4) Jangka waktu penyelesaian layanan;</p> <p>5) Produk layanan;</p> <p>Saran, prasarana dan/atau fasilitas;</p> <p>7) Kompetensi pelaksana</p> <p>8) Pengawasan internal;</p> <p>9) Jumlah pelaksana;</p> <p>10) Jaminan pelayanan;</p> <p>11) Jaminan keamanan;</p> <p>12) Evaluasi kinerja pelaksana;</p> <p>6) 2. Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;</p> <p>3. Menurunnya jumlah pemangnggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;</p> <p>4. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal.</p>		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2 Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan unit/satuan kerja. Menciptakan	1 Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1 Pembangunan Kerja Sama dan Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 11 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

